

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**ANALISIS FRAUD DIAMOND DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT  
KECURANGAN PADA ALOKASI DANA DESA:  
STUDI DI DESA KABUPATEN BANTUL**



**Dr. Priyastiwi, SE, MSi, Ak, CA.**

**NIDN: 0522106801**

**Hasanah Setyowati, SE, MBA, Ak, CA**

**NIDN: 0528128204**

**STIE Widya Wiwaha**

**Yogyakarta**

**2021**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa dalam perkembangannya kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana APBN senilai Rp 59,2 triliun diberikan untuk 74 ribu desa se-Indonesia

Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian alokasi dana desa yang

diterima pemerintah desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi dana desa sebagai bahan penelitian yang penting dikarenakan: pertama, alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur, maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Kedua, Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah kesamaan antara target dengan realisasi program alokasi dana desa tiap tahunnya cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subyek dan obyek program alokasi dana desa masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat desa, hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial desa. Selain itu, pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Seharusnya, berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah desa.

Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit BPK akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bahkan korupsi.

KPK (2020) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan KPK, pada tahun 2017 – 2019 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 17 kasus pada tahun 2018 dan melonjak menjadi 41 kasus pada tahun 2019. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2017 dengan 96 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 154 kasus. Dari 154 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus dengan objek APBDes berjumlah 127 kasus, sementara berturut-turut terdapat 27 kasus dengan objek bukan anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Pemungutan liar yang dilakukan aparat desa merupakan kasus dengan objek selain APBDes. Sedangkan kasus terkait APBDes yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa dan lain-lain. Berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagian besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 32 kasus penggelapan, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan atau proyek fiktif 15 kasus dan sebanyak 14 kasus pembengkakan anggaran. Melonjaknya korupsi di sektor desa menggambarkan catatan buruk yang berkaitan erat dengan pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Seluruh kasus korupsi tersebut mensyaratkan bahwa desa yang diyakini menjadi bagian dari pembangunan sampai detik ini menjadi ladang korupsi yang baru.

APBDes yang dikorupsi dan disalahgunakan akan memberikan pengaruh sangat negatif bagi harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan terhitung setelah tiga tahun implementasi kebijakan pemerintah untuk mendukung keuangan

desa bersumber dari APBN. Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan pada bulan September 2016 tingkat angka kemiskinan melonjak sampai 27,76 juta orang dan menjadi 27,77 juta orang pada bulan Maret 2017.

Fenomena penyalahgunaan keuangan desa menimbulkan kegendahan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika dianalisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta.

Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi tingginya kecurangan pengelolaan dana desa karena kompetensi yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang rendah tingkat pengawasan dari masyarakat (Mondale et al., 2017); Wibisono, 2017). Pemahaman dan pengawasan yang efektif bisa berdampak positif terhadap peningkatan keuangan desa akuntabilitas (Kadir et al., 2017; Widarnawati, 2018). Sementara itu, Mansor & Abdullahi (2015) menggunakan teori kecurangan untuk menjelaskan penyebab korupsi di organisasi publik dan menemukan bahwa tekanan mempengaruhi korupsi. Namun, penelitian kecurangan pada pemerintah desa, khususnya pada alokasi dana desa masih terbatas.

Untuk memahami penyimpangan keuangan desa, konsep *fraud diamond* dapat digunakan. Ini adalah konsep yang dikembangkan dari konsep fraud triangle (Noviandi et al., 2016; Muhsin et al., 2018). Pencegahan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa alokasi juga dapat dijelaskan dalam perilaku yang direncanakan teori dan teori perkembangan (Rahimah et al., 2018). Sedangkan Amrul & Khotmi (2016) memastikan pengaruh yang kuat dari pengendalian internal dalam mengantisipasi pengelolaan keuangan yang curang tren. Namun, Muhsin et al. (2018) gagal membuktikan konsep *fraud diamond* untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku curang. Sama hasil juga diperoleh Yusof (2016). Sementara itu, Aprilia (2017) dapat menemukan signifikansi pengaruh dari faktor eksternal

terhadap kecurangan keuangan. Oktaviani et al. (2018) menunjukkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi potensi tersebut atas kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa termasuk praktik akuntabilitas, konflik kepentingan, dan penegakan hukum.

Tingkat religiusitas juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan akademik. Menurut Basri (2015), seringnya terjadinya kecurangan disebabkan karena kesadaran mahasiswa yang kurang baik. Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali pemahaman tentang agama sebagai pengontrol tindakan yang sesuai dengan nilai budaya dan agama guna mencegah terjadinya kecurangan. Purnamasari & Amaliah (2015) dan Zamzam et al. (2017) membuktikan bahwa faktor agama yang mempengaruhi kecurangan akademik ditinjau dari aspek moral berada pada kriteria sedang cenderung tinggi, dimana persentase menunjukkan bahwa kriteria sedang cenderung diimbangi dengan kriteria tinggi. Sedangkan Pamungkas (2014) membuktikan bahwa seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi memiliki sikap yang lebih etis dalam segala aspek kehidupan, yang membuat mereka menjadi kurang bersedia untuk melakukan perilaku curang.

Penelitian ini menggunakan konsep *fraud diamond* untuk menguji pengaruh dimensi tersebut terhadap kecurangan keuangan. Berdasarkan teori agensi digunakan dalam menguji determinan financial fraud dalam mengelola dana desa. Penelitian ini juga memasukkan aspek religiusitas sebagai faktor yang dapat memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalitas dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.

## **1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang ada, masih banyak kecurangan yang terjadi alokasi dana desa. Penelitian saat ini lebih mengutamakan pada bagaimana kecurangan tersebut terjadi. Namun belum banyak penelitian yang menjelaskan mengapa kecurangan tersebut terjadi. Penelitian juga belum menjelaskan bagaimana pengaruh religiusitas terhadap niat kecurangan. Padahal banyak pemangku pemerintahan pada

tingkat desa yang tingkat religiusitasnya tinggi. Oleh karena itu perlu penelitian yang menguji secara empiris faktor yang mempengaruhi kecurangan pada alokasi dana desa. Selain itu, penelitian juga diperlukan untuk menguji pengaruh religiusitas dalam menurunkan niat kecurangan pada alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tekanan terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa?
2. Bagaimana pengaruh kesempatan terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana pengaruh rasionalitas terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa?
4. Bagaimana pengaruh kapabilitas terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa?
5. Bagaimana pengaruh pemoderasi religiusitas terhadap hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka bertujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.
2. Menguji secara empiris pengaruh religusitas yang memoderasi hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Penelitian tentang *fraud diamond* terhadap niat kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa diharapkan mempunyai kontribusi teoritis, kontribusi metodologis dan kontribusi praktis.

1. Kontribusi teoritis dalam penelitian ini adalah penggunaan teori agensi pada organisasi pemerintah. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen melakukan tindakan yang ingin menguntungkan diri sendiri jika mereka diberi kewenangan dalam mengelola keuangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat desa. Perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* dilakukan karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis yaitu pengukuran tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapabilitas dan niat kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa.
3. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi praktis untuk memberikan pemahaman dan cara pengendalian perilaku kecurangan pada alokasi dana desa, ketika diketahui faktor yang menyebabkan niat kecurangan pada alokasi dana desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### *2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)*

Jensen & Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan untuk agen. Pada praktiknya manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dengan tanggung jawab meningkatkan keuntungan para pemilik (*principal*), tapi manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Ketika manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya, dapat memungkinkan *agent* tidak bertindak sesuai kepentingan *principal*. Berdasarkan hal tersebut informasi yang dihasilkan oleh manajemen memungkinkan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* yang memicu adanya biaya agensi.

##### *2.1.2. Fraud (Kecurangan)*

*Fraud* adalah suatu tindakan kecurangan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan perilaku yang tidak jujur untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

*Fraud* atau kecurangan berdasarkan definisi ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas dan pihak lain (Kusumawardhani, 2013).

Jenis-jenis *fraud* menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2018) merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang disebut *Fraud Tree*, yaitu sebagai berikut:

a) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

*Asset misappropriation* adalah penyelewengan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud atau kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible (defined value)* atau dapat diukur/dihitung.

b) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

*Fraudulent statement* adalah perilaku yang dilakukan oleh satu atau lebih pejabat atau eksekutif dari suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk dilakukannya rekayasa kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan bagi pihak tertentu atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah manipulasi perusahaan (*window dressing*).

c) Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling susah untuk dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang paling banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih terbilang lemah dan masih kurangnya pengetahuan akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Fraud jenis ini susah untuk dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan masing-masing (*simbiosis mutualisme*). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh

sekelompok orang dengan tujuan mencari keuntungan dan merugikan pihak lain, tindakan penyuapan (*bribery*) yang diberikan atas dasar balas budi kepada penerima suap, penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

d) *Cybercrime*

Delf (2004) menambahkan satu lagi jenis *fraud*, yaitu *cybercrime*. Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti di masa depan karena perkembangan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu.

### 2.1.3. *Fraud Diamond*

*Fraud diamond* merupakan pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang kemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan bentuk penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu teori *fraud triangle*. *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yaitu *capability* (kemampuan). Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa ada pembaharuan *fraud triangle* untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan pencegahan *fraud* yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat yaitu *capability* (kemampuan). Dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan personal yang ada di dalam perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan *fraud*. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi *fraud* adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain *pressure* dan *rationalization* serta kombinasi *opportunity* dan *capability*. Banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan *capability* (kemampuan) khusus yang ada dalam suatu perusahaan.

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari penipuan.

Secara keseluruhan elemen-elemen *fraud diamond theory* ada empat:

1. *Pressure* (tekanan)

Tekanan yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. *Pressure* atau tekanan ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan *fraud* pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri yang membuat seseorang tersebut melakukan kecurangan.

2. *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. *Opportunity* merupakan peluang yang memungkinkan seseorang melakukan *fraud*. Para pelaku kecurangan mempercayai bahwa aktivitas kecurangan yang mereka lakukan tidak dapat terdeteksi.

3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Rasionalisasi yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Ketika tindakan *fraud* dapat terdeteksi, biasanya para pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri mereka. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan.

#### 4. *Capability* (Kemampuan)

*Capability* yaitu kemampuan merupakan suatu faktor kualitatif yang menurut Wolfe dan Hermanson (2004) merupakan salah satu pelengkap dari model *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey Donald (1953). *Capability* yaitu seberapa besar daya dan kemampuan dari seseorang itu melakukan kecurangan (*fraud*) di lingkungan perusahaan. Dalam Zaini, Carolina (2015), Wolfe dan Hermanson (2004) percaya bahwa banyak penipuan tidak akan terjadi apabila tidak ada orang yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan kecurangan. Meskipun seseorang memiliki tekanan, peluang tanpa adanya kemampuan, maka kemungkinan terjadinya kecurangan akan kecil. Karena sebenarnya orang melakukan kecurangan diimbangi dengan kemampuan.

Adapun sifat-sifat yang dijelaskan Wolfe dan Hermanson (2004) terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: *Positioning, Intelligence and Creativity, Confidence/ Ego, Coercion, Deceit, Stress* (Caesar, 2017).

##### 1) *Positioning*

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

##### 2) *Intelligence and creativity*

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.

##### 3) *Confidence/Ego*

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme).

4) *Coercion*

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.

5) *Deceit*

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.

6) *Stress*

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### *2.2.1. Pengaruh tekanan niat kecurangan*

Tekanan, menurut Pernyataan Standar Audit No. (SAS No.99/AU Bagian 316 insentif, merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2002). Manajer memiliki motif penipuan yang didorong oleh insentif karena mereka menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target yang mengarah pada laporan keuangan yang menipu. Di samping itu pengelola juga punya motif penipuan yang didorong tekanan karena mereka memiliki peluang untuk menghindari berbagai situasi yang

berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, menerima opini *going concern* atau pelaporan kerugian. Dorminey et al. (2012) menyatakan bahwa ada empat faktor yang memotivasi individu untuk melakukan fraud intention yaitu MICE. Tekanan internal muncul karena tekanan ekonomi individu yang mengarah pada niat penipuan di dalamnya individu. Tekanan hidup tersebut dapat berupa beban keluarga atau gaya hidup sosial lingkungan kerja atau sosial mereka.

Model segitiga penipuan Cressey Donald (1953) dan juga Hogan et al. (2008), Trompeter et al. (2013) secara konsisten mengkategorikan tiga faktor pemicu penipuan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan peluang (segitiga penipuan). Tekanan atau yang biasa disebut sebagai insentif yang memotivasi niat penipuan terdiri dari motif bertemu estimasi analis (Koh et al., 2008), kompensasi dan struktur insentif (Burns dan Kedia, 2006; Armstrong et al., 2013). Tekanan dapat berupa kondisi individu yang mendorong tindakan tidak etis, yaitu stres (Piquero et al., 2005), stres sosial, jaringan dan interaksi sosial dalam masyarakat (Engdahl, 2009; Block dan Griffin, 2002). Dengan demikian, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

**H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.**

### 2.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Niat Kecurangan

Peluang adalah kondisi yang dimanfaatkan oleh individu dalam organisasi ketika internal kontrol lemah. Studi ini mengusulkan untuk menggunakan tidak adanya sistem *whistleblowing* sebagai *proxy* dari faktor peluang karena kondisi ini bisa dibilang mengarah ke yang lebih besar peluang untuk melakukan penipuan. *Whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi tentang tindakan ilegal dan tidak bermoral yang

dilakukan oleh anggota organisasi lainnya (Miceli et al., 2008; Dalton & Radtke, 2013). Peluang adalah faktor kedua dari *fraud triangle* yang mengacu pada kondisi yang menunjukkan kelemahan sistem di dalamnya organisasi. Trompeter et al. (2013) menjelaskan peluang dalam Komite Organisasi Sponsoring dari kerangka Komisi Treadway (COSO, 2013) itu terdiri dari lima komponen: lingkungan pengendalian, manajemen risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Peluang sebagian besar berada di bawah kendali lingkungan, termasuk komite audit (Archambeault et al., 2008; Magilke et al., 2009), dewan direksi (Collins et al., 2009) dan kelemahan pengendalian internal (Smith et al., 2000). Lebih lanjut, Dellaportas (2013) secara empiris menunjukkan hubungan antarpeluang dan penipuan dalam kasus penyalahgunaan aset. Secara spesifik, pengendalian internal yang lemah sistem memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang ada tidak terdeteksi. Said et al. (2018) mendukung temuan ini dengan mendemonstrasikan hubungan antara peluang dan penipuan dalam bentuk penyalahgunaan aset. Jadi, berikut ini adalah hipotesis kedua kami:

**H2: Sistem pengendalian internal yang lemah berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.**

### 2.2.3. Pengaruh Rasionalisasi terhadap Niat Kecurangan

Trompeter et al. (2013) secara empiris menunjukkan bahwa sarjana non akuntansi telah secara ekstensif menyelidiki rasionalisasi dalam berbagai pengaturan. Secara umum, faktor rasionalisasi dalam penipuan segitiga bisa dibilang mendahului tindakan penipuan. Individu dengan niat penipuan cenderung mengalami konflik dalam diri mereka sendiri atau disonansi kognitif. Ashforth & Anand (2003) mengusulkan delapan jenis penyangkalan untuk merasionalisasi kecurangan (korupsi), yaitu pengingkaran legalitas, penolakan

tanggung jawab, penolakan cedera, penolakan korban, bobot sosial, banding yang lebih tinggi loyalitas, metafora buku besar dan memfokuskan kembali perhatian. Rasionalisasi memfasilitasi individu untuk mengurangi disonansi kognitif mereka (Ramamoorti, 2008, 2009).

Rasionalisasi adalah kemampuan pembuat keputusan untuk melakukan penipuan dan untuk membenarkannya tindakannya masuk akal. Trompeter et al. (2013) secara empiris menunjukkan rasionalisasi tersebut (pembenaran moral setelah penipuan) erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral pembenaran sebelum penipuan). Rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi (Piquero et al., 2005). Teori disonansi kognitif menjelaskan kondisi ketika individu merasionalisasikannya perilaku dengan konsep yang mereka buat sendiri (Festinger, 1957). Disonansi kognitif adalah konflik internal individu ketika mereka melakukan tindakan tidak etis yang tidak konsisten dengan keyakinan mereka. Argumen dan studi sebelumnya mengarah pada hipotesis ketiga:

**H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.**

#### *2.2.4. Pengaruh Kapabilitas terhadap Niat Kecurangan*

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Kapabilitas adalah kemampuan untuk mengontrol organisasi mereka. ACFE Report 2018 mendokumentasikan kemampuan yang sangat baik individu (manajemen puncak) melakukan lebih banyak kecurangan dibandingkan dengan manajemen rendah posisi. Penipu bisa dibilang ada di setiap lini organisasi. Namun, mereka yang memiliki kemampuan tinggi mempunyai kekuatan lebih untuk mengendalikan

penipuan mereka. Biasanya penipu baru pertama kali adalah pelanggar, paruh baya, terpelajar, karyawan tepercaya dan/ atau dianggap sebagai warga negara yang baik di pekerjaan mereka (Ramamoorti et al., 2009). Penipuan yang dilakukan oleh manajemen puncak secara luas dikenal sebagai kejahatan kerah putih.

Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan segitiga penipuan menjadi berlian penipuan oleh menambahkan faktor keempat (kemampuan). Lebih lanjut, Dorminey et al. (2012) menjelaskan kapabilitas itu memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Argumen ini sejalan dengan fakta bahwa individu dengan kapabilitas tinggi (sebagai manajer puncak) cenderung melakukan lebih banyak kecurangan daripada manajer rendah (ACFE, 2018). Dengan pertimbangan bahwa manajer puncak memiliki kapabilitas yang dapat diandalkan potensi terjadinya *fraud*, berikut hipotesis keempat:

**H4: Kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa.**

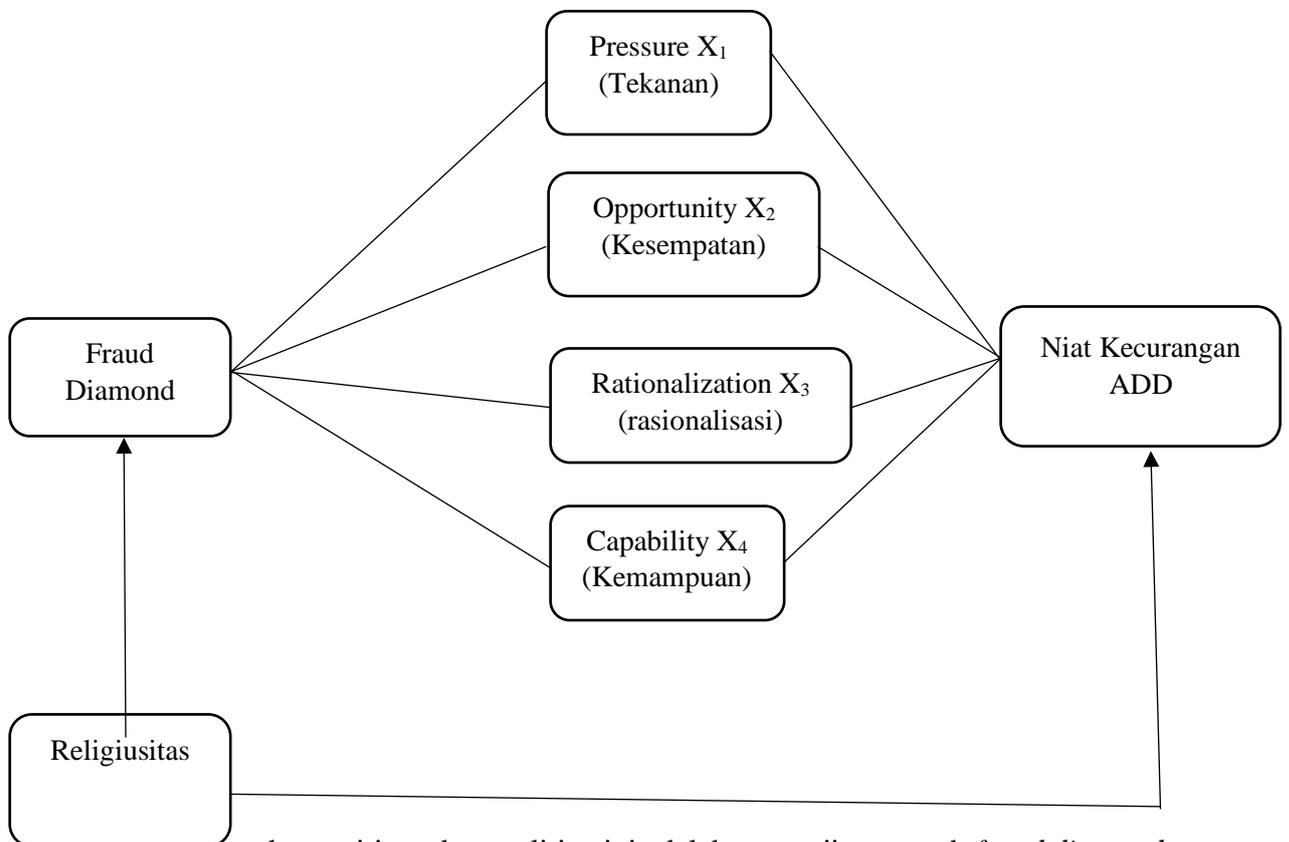
#### 2.2.5. Pengaruh Religiusitas terhadap Niat Kecurangan

Purnamasari dan Amaliah (2015) dalam risetnya menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan tampak dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut dianggap sebagai tolak ukur tingkat religiusitas seseorang akan mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang religiusitas akan berkorelasi dengan sikap dan

perilaku serta hasil kerja. Religiusitas sebagai faktor yang dapat mempengaruhi niat kecurangan dan memiliki korelasi dengan *fraud diamond* maka hipotesis kelima dinyatakan sebagai berikut:

**H5: Religiusitas memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap kecurangan pada Alokasi Dana Desa**

### 2.3. Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis pada penelitian ini adalah menguji pengaruh *fraud diamond* terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa. Variable *fraud diamond* terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalitas dan kapabilitas. Penelitian ini memasukkan religiusitas sebagai factor yang memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalitas, dan kapabilitas terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa. Religiusitas diharapkan akan menurunkan niat kecurangan, meskipun ada tekanan,

kesempatan, rasionalitas dan kapabilitas untuk melakukan kecurangan pada alokasi dana desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dijabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini. Beberapa hal yang dijelaskan pada bab ini adalah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran data variabel penelitian serta metode analisis data.

#### **3.1. Sampel dan Populasi**

Populasi dalam penelitian adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau aparat desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa. Sampel dipilih berdasarkan kriteria (*purposive sampling*) yaitu aparat desa yang dan berhubungan dengan penegelolaan dana desa. Kriteria yang bisa menjawab pertanyaan kusioner adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau Kepala Urusan (KAUR) Keuangan, Kepala Seksi (KASI) yaitu KASI Pemerintahan, KASI Kesejahteraan dan KASI Pelayanan.

#### **3.2. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antar variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel dependen. Dari penjelasan di atas kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen penelitian ini adalah niat kecurangan. Kecurangan keuangan diukur berdasarkan indikator yang digunakan oleh Yani et al. (2016); (a) kecenderungan untuk memanipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung, (b) kecenderungan untuk menggambarkan atau menghilangkan peristiwa, transaksi atau informasi penting dari keuangan pernyataan; (c) kecenderungan untuk diterapkan secara sengaja prinsip akuntansi tidak benar; (d) kecenderungan untuk membuat laporan keuangan palsu karena pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) aset yang membuat entitas membayar barang/jasa yang tidak diterima, dan (e) kecenderungan untuk membuat laporan keuangan yang salah karena perlakuan yang tidak tepat terhadap aset dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan ini bisa melibatkansatu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga.

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen penelitian ini ada empat yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan relegiusitas.

### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga tidak terjadi kesalah fahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data.

a. Tekanan ( $X_1$ )

Indikator variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan mengacu pada Wolfe dan Hermanson (2004). Variabel *pressure*/ tekanan menggunakan 6 indikator, antara lain: tuntutan keluarga, iri dengan onlineshop lainnya, atasan memeriksa pekerjaan secara berkala, atasan meminta pegawai berbuat tidak jujur, target atasan, dan bonus yang menggiurkan.

b. Kesempatan ( $X_2$ )

Indikator variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan mengacu pada Wolfe dan Hermanson (2004). Variabel *opportunity*/ kesempatan menggunakan 4 indikator, antara lain: sanksi ringan, tidak ada yang mengawasi, kecanggihan internet dan teknologi memberikan kemudahan, dan tidak ada pemeriksaan dari kantor.

c. Rasionalisasi ( $X_3$ )

Indikator variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan mengacu pada Wolfe dan Hermanson (2004). Variabel *rationalization*/ rasionalisasi menggunakan 4 indikator, antara lain: melakukan kecurangan orderan (*self order*) karena orang lain juga pernah melakukannya, merupakan hal yang biasa, dibantu oleh rekan, dan merasa tidak merugikan siapapun saat melakukan kecurangan.

d. Kemampuan ( $X_4$ )

Indikator variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan mengacu pada Wolfe dan Hermanson (2004). Variabel *capability*/ kemampuan menggunakan 4 indikator antara lain: pelaku dapat menekan rasa bersalah atau bahkan tidak merasa bersalah, pelaku dapat membaca peluang yang ada, pelaku

meminta bantuan rekan, dan pelaku memiliki perangkat khusus untuk melakukan kecurangan.

e. Religiusitas (X5)

Indikator religiusitas diukur jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan (Purnamasari dan Amaliah, 2015).

f. Niat Kecurangan (Y)

Kecurangan keuangan dalam pengelolaan dana desa. Keuangan penipuan pengelolaan dana desa diukur sejauh mana aparat desa cenderung berkomitmen kecurangan keuangan, yaitu kesalahan penyajian yang disengaja dalam laporan keuangan dan penyajian yang keliru pengobatan yang tidak tepat. Kecurangan keuangan diukur berdasarkan indikator yang digunakan oleh Yani et al. (2016): (a) kecenderungan untuk memanipulasi, memalsukan, atau mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung, (b) kecenderungan untuk menggambarkan atau menghilangkan peristiwa, transaksi atau informasi penting dari keuangan pernyataan; (c) kecenderungan untuk diterapkan secara sengaja prinsip akuntansi tidak benar; (d) kecenderungan untuk membuat laporan keuangan palsu karena pencurian (penyalahgunaan/penggelapan) aset yang membuat entitas membayar barang / jasa yang tidak diterima, dan (e) kecenderungan untuk membuat laporan keuangan yang salah karena perlakuan yang tidak tepat terhadap aset dan disertai dengan catatan atau dokumen palsu dan ini bisa melibatkansatu atau lebih individu di antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga.

### **3.4. Instrumen dan Alat Pengumpulan Data**

#### *1. Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Peneliti mendesain kuesioner online untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kuesioner dibagikan kepada mahasiswa secara langsung. Para responden diminta untuk secara sukarela bertanggung jawab untuk beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti meminta responden untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner terlampir dengan mengambil 5-10 menit untuk menjawab bagian pertanyaan tentang faktor yang mempengaruhi niat kecurangan.

## *2. Instrument Penelitian*

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini adalah skala likert. Skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2013). Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

### **3.5. Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen**

Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas untuk menguji data dengan menggunakan kuesioner, melihat pertanyaan yang diisi responden apakah sudah valid untuk pengambilan data.

#### *1) Uji Validitas*

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Ghazali (2006). Dengan kriteria jika nilai sig (2- tailed) pada total skor konstruk  $< 0,05$  item pernyataan dikatakan valid.

#### *2) Uji Reliabilitas*

Menurut Ghozali (2006) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dinyatakan andal bila memiliki nilai alpha Cronbach  $> 0,6$ .

### **3.6. Metoda Analisis Data**

#### *3.6.1. Uji Asumsi Klasik*

Digunakan jika variabel independennya lebih dari satu sehingga diperlukan pengujian ke variabel independen hasil uji regresi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya (Sujarweni, 2016).

##### 1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2006). Apabila nilai probabilitas  $\geq 0,05$  maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu (Umar, 2019).

Dalam Ghozali (2006) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\leq 10$ . Apabila VIF suatu model kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,10 maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinieritas

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam (Ghozali, 2006) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan scatterplots, yaitu memperhatikan plots dari sebaran residual dan variabel yang diprediksikan.

#### 3.6.2. Pengujian Hipotesis

##### 1. Analisis Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun rumus dari regresi linier berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

**Dimana:**

Y = Variabel dependen (Kecurangan Flash Sale)

$\alpha$  = Konstanta regresi

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = Variabel independen (Tekanan)

X2 = Variabel independen (Kesempatan)

X3 = Variabel independen (Rasionalisasi)

$X_4$  = Variabel independen (Kemampuan)

$e$  = Error

## 2. Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2006), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan  $\alpha$  sebesar 5%, yaitu dengan membandingkan p-value. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

- a) Apabila p-value  $>$  5%, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Apabila p-value  $<$  5%, maka hipotesis diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2011) Uji statistik F (uji signifikansi stimulan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka  $H_0$  tidak didukung, yang artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen dan variabel independen.

## 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dalam Ghozali (2006) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Data Demografi Penelitian

Responden yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini sebanyak 72 orang. Kuesioner sudah dicek validitasnya dan seluruh data dari responden adalah valid, tidak ada data yang dieliminasi. Tabel 1 memberikan gambaran data demografi responden untuk penelitian.

**Tabel 1. Data Demografi Responden Penelitian**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	36	50%
Laki-laki	36	50%
<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
<b>Umur (Tahun)</b>		
< 35	28	38%
>35-40	17	24%
>40-45	15	21%
>45	12	17%
<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>
<b>Pendidikan</b>		
SLTA	50	70%
D3	10	14%
S1	12	16%

<b>Jumlah</b>	72	100%
<b>Masa Kerja (Tahun)</b>		
<10	25	35%
>10-20	31	43%
>20	16	22%
<b>Jumlah</b>	72	100%
<b>Kabupaten</b>		
Kota Yogyakarta	16	22%
Sleman	12	16%
Bantul	18	25%
Kulon Progo	16	22%
Gunung Kidul	10	15%
<b>Jumlah</b>	72	100%

Pada tabel 1 terlihat bahwa dari 72 responden terdapat proporsi yang sama besar untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing adalah 36 orang perempuan (50%) dan 36 orang (50%) berjenis kelamin laki-laki. Responden berumur antara 26 tahun sampai dengan 54 tahun. Mayoritas responden berumur kurang dari 35 tahun dengan proporsi sebesar 38%. Responden dengan kisaran umur antara 35 tahun sampai 40 tahun memiliki proporsi 24% dan responden dengan kisaran umur di atas 40 tahun sampai 45 tahun proporsinya sebesar 21%. Sisanya sebesar 17% merupakan responden dengan umur lebih dari 45 tahun. Menurut tingkat pendidikan, jumlah paling banyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 50 orang (70%), lalu sebanyak 12 (16%) responden memiliki tingkat pendidikan S1, dan sisanya adalah 10 (14%) responden dengan tingkat pendidikan

D3. Berdasarkan masa kerja dengan rentang 2 tahun sampai 30 tahun, sebesar 22% responden memiliki masa kerja di atas 20 tahun. Sedangkan masa kerja partisipan sampai dengan 10 tahun sebesar 35%, dan sisanya 43% masa kerja responden lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Kategori terakhir adalah asal kabupaten responden. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 kabupaten asal responden. Responden dengan asal Kabupaten Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo memiliki persentase yang sama sebesar 22%. Lalu responden dari Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman berurutan memiliki persentase sebesar 15% dan 16%. Sisanya sebesar 25% responden berasal dari Kabupaten Bantul. Responden yang dipilih dalam posisi karena memiliki pengetahuan tentang kecurangan yang terjadi pada alokasi dana desa.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Statistik Deskriptif Demografi dan Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur	72	26	54	38.79	6.848
Pendidikan	72	1	3	1.47	.769
MasaKerja	72	2	30	14.79	6.848
Kabupaten	72	1	5	2.89	1.359
Tekanan	72	2.00	5.00	3.6250	.59191
SistemPengendalian	72	2.00	5.00	4.0139	.77810
Rasionalitas	72	1.00	4.00	2.2222	.79119
Kapabilitas	72	1.00	5.00	3.7083	.63772
Religiusitas	72	2.00	5.00	4.0417	.70085
KencdrKecurangan	72	1.00	4.00	2.8472	.91405
Valid N (listwise)	72				

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui terdapat 72 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Terdapat data mengenai umur, (tingkat)

pendidikan, masa kerja, dan (asal) kabupaten responden. Deskripsi data yang disajikan adalah data minimum, data maximum, data mean (rerata), dan data standar deviasi untuk masing-masing kriteria. Selanjutnya juga dapat diketahui data variabel-variabel yang diteliti yaitu: tekanan, sistem pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, religiusitas, dan kecenderungan kecurangan.

### **2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Uji validitas ini dilakukan untuk menguji 30 pertanyaan yang bertujuan untuk menguji perbedaan persepsi terhadap perilaku korupsi yang dibagi menjadi enam dimensi yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk setiap dimensi perilaku koruptif. Selain itu, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam analisis ini. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 5\%$ ). Berdasarkan hasil uji validitas, jelas bahwa semua item pertanyaan (A1-F5) menunjukkan nilai item correlation-total correlation yang valid dan harus dimasukkan pada analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memahami tentang semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner yang karenanya, berarti bahwa semua item pertanyaan itu valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa bahwa semua pertanyaan memiliki Cronbach Alpha besar (0,540). Menurut Nunally & Bernstein (1978) dapat dikatakan bahwa semua indikator dapat diandalkan untuk memeriksa apakah ada perbedaan perilaku korupsi yang dirasakan. Oleh karena itu, item pertanyaan dapat digunakan sebagai alat ukur yang andal.

### **2.2. Hasil Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Hasil Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.330	.850		1.565	.122
Tekanan	.461	.181	.298	2.546	.013
SistemPengendalian	-.382	.135	-.325	-2.829	.006
Rasionalitas	.164	.137	.142	1.201	.234
Kapabilitas	-.097	.190	-.067	-.509	.612
Religiusitas	.340	.176	.261	1.932	.058

Dependent Variable: KencenderKecurangan

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,333 + 0,298X1 - 0,325X2 - 0,142X3 - 0,067X4 + 0,261X5$$

Uji hipotesis ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji F dan Uji t yang dapat dilihat pada Tabel 3. Pada pengujian tersebut didapatkan hasil R<sup>2</sup> sebesar 0,245 atau 24,5% artinya variabel tekanan, sistem pengendalian, rasionalitas, kapabilitas, dan religiusitas mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan (*fraud*) sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung sebesar 4,283 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 (<0,05), maka model regresi dinyatakan fit atau layak.

Hasil pengujian hipotesis 5 dapat dilihat pada table 4 yang menunjukkan moderasi religiusitas pada hubungan tekanan, system pengendalian, rasionalitas, kapabilitas terhadap kencednerungan kecurangan.

**Tabel 4 Hasil Analisis Moderasi Religiusitas**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.946	.436		4.464	.000
	Religiusitas*Tekanan	.121	.046	.462	2.614	.011
	Religiusitas*Sistem Pengendalian	-.074	.031	-.378	-2.396	.019
	Religiusitas*Rasionalitas	.057	.034	.221	1.712	.092
	Religiusitas*Kapabilitas	-.011	.047	-.046	-.229	.820

Hasil Tabel 4 menunjukkan bahwa pada hubungan tekanan dan system pengendalian terhadap kecenderungan kecurangan signifikan p value= 0,01 dan 0,019. Hal ini dapat dinyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap hubungan tekanan dan sistem pengendalian dengan kecenderungan kecurangan. Sedangkan untuk pengaruh religiusitas pada hubungan rasionalitas dan kecenderungan kecurangan signifikan pada level  $\alpha=0,10$ . Namun pengaruh religiusitas terhadap hubungan kapabilitas dengan kecenderungan kecurangan tidak signifikan

### **2.3. Pembahasan**

#### ***Pengaruh Tekanan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H). Pada Tabel 3 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 ( $<0,05$ ). Penelitian ini mendukung tekanan berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H1). Artinya bahwa niat kecurangan pada alokasi dana desa akan lebih tinggi ketika ada tekanan. Ini berarti bahwa tekanan secara signifikan mempengaruhi kecenderungan kecurangan atau adanya tekanan terhadap seseorang akan memicu terjadinya kecurangan. Penelitian ini bersesuaian dengan Pernyataan Standar Audit No. (SAS No.99 /AU Bagian 316) insentif, merupakan faktor inheren yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan (AICPA, 2002). Manajer memiliki motif penipuan yang didorong oleh insentif karena mereka menerima keuntungan berdasarkan pencapaian target yang mengarah pada laporan keuangan yang menipu. Di samping itu pengelola juga punya

motif penipuan yang didorong tekanan karena mereka memiliki peluang untuk menghindari berbagai situasi yang berpotensi merugikan perusahaan mereka, seperti melanggar perjanjian hutang, menerima opini *going concern* atau pelaporan kerugian. Lalu model segitiga penipuan Cressey Donald (1953) dan juga Hogan et al. (2008), Trompeter et al. (2013) secara konsisten mengkategorikan tiga faktor pemicu penipuan, yaitu tekanan, rasionalisasi dan peluang (segitiga penipuan). Tekanan atau yang biasa disebut sebagai insentif yang memotivasi niat penipuan terdiri dari motif bertemu estimasi analisis ((Koh et al., 2008), kompensasi dan struktur insentif (Burns dan Kedia, 2006; Armstrong et al., 2013). Tekanan dapat berupa kondisi individu yang mendorong tindakan tidak etis, yaitu stres (Piquero et al., 2005), stres sosial, jaringan dan interaksi sosial dalam masyarakat (Engdahl, 2009; Block dan Griffin, 2002). Dengan demikian H1 diterima bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)

### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Hipotesis 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H2). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,006 ( $< 0,05$ ) berarti sistem pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang menunjukkan hipotesis kedua diterima. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat menimbulkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dellaportas (2013) yang secara empiris menunjukkan hubungan antarpeluang dan penipuan dalam kasus penyalahgunaan aset. Secara spesifik, pengendalian internal yang lemah sistem memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memanfaatkan kemampuannya dalam memanipulasi sistem yang ada tidak terdeteksi. Sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan menunjukkan hipotesis kedua diterima.

### ***Pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Hipotesis 3 menyatakan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H3). Tabel 3 menunjukkan nilai sigfikansi sebesar 0,234 ( $> 0,05$ ), rasionalisasi tidak signifikan. H3 tidak didukung, berarti bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga disimpulkan bahwa rasionalisasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trompeter *et al.* (2013) yang secara empiris menunjukkan rasionalisasi tersebut (pembenaran moral setelah penipuan) erat kaitannya dengan konstruk netralisasi (moral pembenaran sebelum penipuan) dan (Piquero *et al.*, 2005) yang menyebutkan bahwa rasionalisasi kecurangan muncul karena adanya justifikasi bahwa kejahatan korporasi yang dilakukan memberikan keuntungan bagi organisasi. H3 ditolak sehingga dinyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa.

### ***Pengaruh Kapabilitas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Hipotesis 3 menyatakan kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H4). Pada Tabel 3 diketahui nilai sigfikansi sebesar 0,612 ( $>0,05$ ), berarti kapabilitas tidak signifikan. Hipotesis keempat tidak didukung, ini berimplikasi bahwa kapabilitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kapabilitas tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Wolfe dan Hermanson (2004) yang berpendapat bahwa kapabilitas memicu terjadinya kecurangan. Segitiga penipuan yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi berlian penipuan dengan menambahkan faktor keempat yaitu kemampuan. Penelitian kali ini juga tidak sejalan dengan Dorminey *et al.* (2012) yang menjelaskan bahwa kapabilitas itu memodifikasi konstruksi peluang dengan membatasi peluang dalam arti individu harus memiliki keterampilan yang sesuai untuk menggunakan peluang tersebut. Kapabilitas berpengaruh positif terhadap niat kecurangan pada alokasi dana desa (H4) ditolak.

***Pengaruh Religiusitas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud).***

Hipotesis 5 menyatakan bahwa religiusitas memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap kecurangan pada Alokasi Dana Desa (H5). Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,058 ( $> 0,05$ ). Dengan demikian H5 secara signifikan tidak didukung yang berarti bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Amaliah (2015) yang menyatakan bahwa kereligiusan seseorang akan tampak dalam pemahamannya dan implementasinya dalam sikap dan perilaku dalam menjalankan aktivitas termasuk kegiatan dalam pekerjaannya. Agama yang dianut merupakan sebagai tolak ukur tingkat religiusitas seseorang yang akan mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jika seseorang percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dan selalu mengawasi seluruh aktivitas hidup seseorang maka orang tersebut akan memiliki implikasi dapat mencegah seseorang dari sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan yang berlaku, dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang baik tentang religiusitas akan berkorelasi dengan sikap dan perilaku serta hasil kerja. H5 ditolak sehingga dinyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap kecenderungan kecurangan alokasi dana desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### ***5.1. Simpulan***

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa dari kelima variabel yang diteliti, hanya tekanan dan sistem pengendalian internal yang lemah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada alokasi dana desa, sedangkan rasionalitas, kapabilitas, dan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

#### ***5.2. Implikasi dan Saran***

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan analisis fraud diamond dan menambahkan variabel religiusitas. Kecurangan akuntansi merupakan salah satu unsur utama dalam korupsi. Untuk pengelolaan alokasi dana desa masih banyak aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kemungkinan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh personil tertentu karena seperti dikemukakan pada hasil penelitian di atas bahwa ternyata tekanan dan sistem pengendalian internal yang lemah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa.

Saran untuk peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan beberapa hal, seperti memperluas objek penelitian dan jumlah responden, serta menambahkan variabel lain yang dimungkinkan dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan moralitas manajemen. Pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden yang akan digunakan dengan melihat tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* sehingga dapat mengklasifikasi kriteria yang lebih spesifik lagi agar tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acch.kpk.go.id (2019). Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi tahun 2017-2019 (per September 2019). Diakses dari <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi>, tanggal 10 Oktober 2020.
- ACFE. (2018). Report To the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2016 Global Fraud Study. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA ) (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Statement on Auditing Standards No. 99. New York, NY: AICPA.
- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENGANTISIPASI KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *VALID Jurnal Ilmiah*, 13(4), 384–389.
- Aprilia, A. (2017). Analisis pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish model pada perusahaan yang menerapkan asean corporate governance scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101–132.
- Archambeault, D. S., DeZoort, F. T., & Hermanson, D. R. (2008). Audit committee incentive compensation and accounting restatements. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 965–992.
- Armstrong, C. S., Larcker, D. F., Ormazabal, G., & Taylor, D. J. (2013). The relation between equity incentives and misreporting: The role of risk-taking incentives. *Journal of Financial Economics*, 109(2), 327–350.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61–77.
- Block, A. A., & Griffin, S. P. (2002). Transnational financial crime: Crooked lawyers, tax evasion, and securities fraud. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 18(4), 381–393.
- Burns, N., & Kedia, S. (2006). The impact of performance-based compensation on misreporting. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 35–67.
- Caesar, M. (2017). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud (Studi pada Perusahaan Property, Real Estate and Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*.
- Collins, D. W., Gong, G., & Li, H. (2009). Corporate governance and backdating of executive stock options. *Contemporary Accounting Research*, 26(2), 403–445.

- Cressey Donald, R. (1953). Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement. *Montclair: Patterson Smith*.
- Dalton, D., & Radtke, R. R. (2013). The joint effects of Machiavellianism and ethical environment on whistle-blowing. *Journal of Business Ethics*, 117(1), 153–172.
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Fórum*, 37(1), 29–39.
- Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley Jr, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Engdahl, O. (2009). Barriers and back regions as opportunity structures for white-collar crime. *Deviant Behavior*, 30(2), 115–143.
- Engdahl, O. (2007), “The role of money in economic history”, *The Journal of Economic History*, Vol. 4, pp. 61-67.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance* (Vol. 2). Stanford university press.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley Jr, R. A., & Velury, U. K. (2008). Financial statement fraud: Insights from the academic literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 27(2), 231–252.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Julyana. (2015). Pengaruh pengendalian internal, kepuasan kerja, moralitas manajemen, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11 (Edisi Khusus), 135–144.
- Kadir, A., Widarini, K. N., Gunawan, D. I., & Puspitasari, D. (2017). The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 1(4), 234–251.
- Koh, K., Matsumoto, D. A., & Rajgopal, S. (2008). Meeting or beating analyst expectations in the post-scandals world: Changes in stock market rewards and managerial actions. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 1067–1098.
- Kusumawardhani, P. (2013). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis fraud triangle pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(3).
- Magilke, M. J., Mayhew, B. W., & Pike, J. E. (2009). Are independent audit committee members objective? Experimental evidence. *The Accounting*

*Review*, 84(6), 1959–1981.

- Mansor, N., & Abdullahi, R. (2015). Fraud triangle theory and fraud diamond theory. Understanding the convergent and divergent for future research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science*, 1, 38–45.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. Psychology Press.
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212.
- Muhsin, M., Kardoyo, K., & Nurkhin, A. (2018). *What Determinants of Academic Fraud Behavior? From Fraud Triangle to Fraud Pentagon Perspective*. *KnE Social Sciences*, 3 (10), 154.
- Noviandi, N., Kusumantoro, I. P., Tasrif, M., & Pradono, P. (2016). Development of land use and transport dynamics model for the impact evaluation of urban development policy. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED AND APPLIED SCIENCES*, 3(10), 1–8.
- Nunally, J. C., & Bernstein, I. (1978). *Psychometric Theory*, ed. New York McGraw.
- Oktaviani, I. A. A., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2018). PENGARUH PAKTIK AKUNTABILITAS, CONFLICT OF INTEREST DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POTENSI FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BULELENG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Pamungkas, I. (2014). Pengaruh religiusitas dan rasionalisasi dalam mencegah dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 48–59.
- Piquero, N. L., Tibbetts, S. G., & Blankenship, M. B. (2005). *Examining the role of differential association and techniques of neutralization in explaining corporate crime*.
- Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015). Fraud prevention: Relevance to religiosity and spirituality in the workplace. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, 827–835.
- Purnamasari (2013). Desi. Factors Affecting Academic Fraud in Students. *Educational Psychology Journal*, 2(1), 13-21.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus

di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, 6(12), 139–154.

- Ramamoorti, S. (2008). The psychology and sociology of fraud: Integrating the behavioral sciences component into fraud and forensic accounting curricula. *Issues in Accounting Education*, 23(4), 521–533.
- Ramamoorti, S., Morrison, D., & Koletar, J. W. (2009). Bringing Freud to Fraud: Understanding the state-of-mind of the C-level suite/white collar offender through “ABC” analysis. *Institute for Fraud Prevention (IFP) at West Virginia University*.
- Said, J., Alam, M. M., Karim, Z. A., & Johari, R. J. (2018). Integrating religiosity into fraud triangle theory: findings on Malaysian police officers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*.
- Smith, J. R., Tiras, S. L., & Vichitlekarn, S. S. (2000). The interaction between internal control assessment and substantive testing in audits for fraud. *Contemporary Accounting Research*, 17(2), 327–356.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Kupas tuntas penelitian akuntansi dengan SPSS*.
- Trompeter, G. M., Carpenter, T. D., Desai, N., Jones, K. L., & Riley, R. A. (2013). A synthesis of fraud-related research. *AUDITING: A Journal of Practice*, 32(Supplement 1), 287–321.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap dana desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2), 8–19.
- Widarnawati, B. W. (2018). Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia). *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(3), 386–2348.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud*.

- Yani, F., Rasuli, M., & Hardi, H. (2016). Pengaruh pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang dimoderasi oleh moralitas individu (Studi empiris pada Perguruan Tinggi di Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 24(4), 32.
- Yusof, K. M. (2016). *Fraudulent financial reporting: An application of fraud models to Malaysian public listed companies*. University of Hull.
- Zaini, Carolina, and S. (2015). No Title. *Analysis of the Effect of Diamond Fraud and Gone Theory toward Academic Fraud (Case Study to Madura Accounting Students)*.
- Zamzam, I., Mahdi, S. A. R., & Ansar, R. (2017). Pengaruh diamond fraud dan tingkat religiuitas terhadap kecurangan akademik (studi pada mahasiswa S-1 di lingkungan perguruan tinggi se kota Ternate). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 3(2).

## LAMPIRAN

### KUISIONER PENELITIAN

#### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ..... (Boleh tidak di isi)
2. Jenis Kelamin : .....
3. Umur : .....
4. Jabatan : .....
5. Masa Kerja : .....Tahun.....Bulan
6. Pendidikan Terakhir : .....

#### Petunjuk Pengisian :

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Saudara. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:

#### Indikator Penilaian :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Berikut kuesioner penelitian yang dapat diisi

No.	Tekanan (Pressure)	STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya memiliki pengeluaran lebih besar					
2.	Saya selalu ingin selalu mendapatkan gaji yang besar untuk memenuhi kebutuhan saya					
3.	Atasan saya selalu meminta saya bekerja sesuai dengan petunjuknya					

4.	Atasan saya selalu meminta saya berbuat mengikuti keinginannya					
5.	Saya merasa tidak enak, jika atasan saya meminta saya melakukan suatu pekerjaan.					
6.	Saya ingin hidup lebih sejahtera dari yang sekarang					

No.	Kesempatan (Opportunity)	STS	TS	KS	S	SS
7.	Di instansi saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.					
8.	Di instansi tempat saya bekerja laporan keuangan segera diterbitkan sesuai dengan peraturan					
9.	Di instansi Saya bekerja seluruh informasi kegiatan dicatat di dalam sistem akuntansi					
10.	Di instansi tempat saya bekerja ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik dan kekayaan instansi					
11.	Di instansi saya bekerja dilakukan Pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan pengendalian					
No.	Rasionalisasi ( <i>Rationalization</i> )	STS	TS	KS	S	SS
12.	Saya melaksanakan pekerjaan karena orang lain juga pernah melakukannya					
13.	Kesalahan kecil yang saya lakukan merupakan hal yang biasa					
14.	Saya dibantu oleh rekan kerja untuk melakukan untuk menutupi kesalahan					

15.	Saya merasa tidak merugikan siapapun saat melakukan kesalahan					
-----	---	--	--	--	--	--

No.	Kemampuan (Capability)	STS	TS	KS	S	SS
16.	Saya merasa mampu mengerjakan pekerjaan saya dalam penyusunan laporan					
17.	Saya dapat mengatasi kesalahan yang saya lakukan					
18.	Saya tidak perlu meminta bantuan rekan kerja untuk melakukan pekerjaan saya					
19.	Saya memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan saya					

No.	Religiusitas	STS	TS	KS	S	SS
20.	Saya rajin beribadah sesuai dengan agama yang saya anut					
21.	Saya selalu berlaku jujur					
22.	Saya tidak pernah melanggar perintah agama					
23.	Saya selalu percaya bahwa Tuhan melihat saya					
24.	Saya tidak pernah mencuri					

No.	Kecurangan	STS	TS	KS	S	SS
1.	Kesalahan dalam pelaporan keuangan desa merupakan hal yang biasa					
2.	Terkadang informasi laporan tidak sesuai dengan kenyataan					
3.	Terkadang harus membayar barang dan jasa yang tidak ada wujudnya					
4.	Terkadang harus meminta bukti kuitansi yang kurang tepat					

5.	Laporan yang penting kadang tidak terlihat dalam laporan kinerja					
----	--	--	--	--	--	--

## REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	JK	Umur	Kab	Masa	Pendidik	X1	X2	X3	X4	X5	Y	X1 X5	X2 X5	X3 X5	X4 X5
1	2	51	1	27	3	3,50	4	2,75	4	4	3,4	14	16	11	16
2	2	36	1	12	3	3,83	4	4	4	4,2	4	16	17	17	17
3	2	46	5	22	2	3,67	4	2	3,5	3,6	2,8	13	14	7	13
4	2	43	3	19	1	3,50	4,6	1,25	3,25	4,6	2,4	16	21	6	15
5	2	42	2	18	3	3,67	4,4	1,75	3,75	4,4	3	16	19	8	17
6	1	32	3	8	1	3,67	5	1	3,75	5	1,2	18	25	5	19
7	1	35	1	11	3	3,33	4	2	3,5	3,4	1	11	14	7	12
8	1	37	1	13	1	4,33	3	2	3,5	4	3	17	12	8	14
9	1	37	5	13	1	3,00	3,6	1,75	2,5	3,2	2,4	10	12	6	8
10	1	48	3	24	2	3,67	4,4	1,75	3,5	4,6	2,6	17	20	8	16
11	2	43	2	19	1	3,00	4,4	2	3,25	4,4	3	13	19	9	14
12	1	33	4	9	2	3,00	3	3	3	3	3	9	9	9	9
13	2	54	2	30	1	4,33	1,6	2,25	4,25	4,2	4	18	7	9	18
14	2	45	2	21	1	4,00	5	3,5	4,5	5	2,6	20	25	18	23
15	2	53	1	29	1	4,17	4	4,25	3,75	4,4	4,2	18	18	19	17
16	1	47	2	23	1	3,50	3,6	3	4	4	3	14	14	12	16
17	1	36	4	12	2	3,33	5	2,25	4,25	3,2	1,2	11	16	7	14
18	1	41	3	17	2	3,17	4,4	1,5	4,25	4,8	1,6	15	21	7	20
19	1	40	1	16	1	3,67	4,2	1,75	3,75	4,4	2,6	16	18	8	17
20	1	31	4	7	1	4,17	4,6	2	3	3,6	2,8	15	17	7	11
21	1	38	4	14	3	2,67	3,6	1,25	2,75	4	2,8	11	14	5	11
22	1	38	4	14	3	2,67	3,6	1,25	2,75	4	2,8	11	14	5	11
23	2	26	3	2	3	3,67	3,8	1,75	3,75	5	3,8	18	19	9	19
24	2	34	1	10	1	4,17	3	2,5	3,5	4,2	3,8	18	13	11	15
25	2	39	3	15	1	2,83	2,4	2	2,5	3	1,8	9	7	6	8
26	2	49	3	25	1	4,00	4,8	2,25	3,75	5	3,6	20	24	11	19
27	2	30	1	6	1	3,33	4	1,5	3,5	4,2	2	14	17	6	15

28	2	35	1	11	1	3,6 7	3, 8	2	3,5	4, 6	2, 8	17	17	9	16
29	2	30	4	6	1	3,0 0	4	1,7 5	3,5	4, 2	2, 6	13	17	7	15
30	2	30	5	6	1	4,6 7	4, 6	1,7 5	4,2 5	3, 2	3, 6	15	15	6	14
31	2	40	1	16	1	4,3 3	4	2,5 3	3	3, 8	2, 4	16	15	10	11
32	1	42	4	18	1	3,8 3	3, 8	2,7 5	4	4, 8	2, 8	18	18	13	19
33	1	45	2	21	1	4,3 3	4, 2	2,2 5	3,2 5	4, 4	3	19	18	10	14
34	1	32	2	8	1	4,3 3	4, 2	2,7 5	2,5	3, 8	4, 2	16	16	10	10
35	1	33	4	9	1	3,1 7	3, 8	4	4	4	3	13	15	16	16
36	1	32	4	8	1	3,0 0	3	2,2 5	2,5	3	3	9	9	7	8
37	2	38	3	14	2	3,0 0	4, 8	1,7 5	3,7 5	4	2, 8	12	19	7	15
38	1	42	3	18	1	4,3 3	3, 8	1,7 5	3,7 5	4, 4	1, 4	19	17	8	17
39	2	44	5	20	1	2,6 7	4	1,5	3	4, 2	3, 4	11	17	6	13
40	1	38	5	14	3	2,8 3	4	1,2 5	4	3, 8	3	11	15	5	15
41	2	32	3	8	1	4,1 7	4, 6	1,5	1,2 5	1, 6	1, 8	7	7	2	2
42	2	34	3	10	1	3,0 0	3	3	3	3	3	9	9	9	9
43	1	44	5	20	1	4,0 0	4, 2	2	3,7 5	4, 6	3, 8	18	19	9	17
44	1	34	4	10	1	3,1 7	3, 8	1,5	4,5	3, 8	3, 8	12	14	6	17
45	2	45	2	21	1	3,8 3	4	2,5	3,7 5	3, 8	3	15	15	10	14
46	2	34	3	10	1	2,1 7	5	1,2 5	3,5	4, 6	1	10	23	6	16
47	2	44	4	20	1	3,8 3	3, 8	3	3,2 5	3, 6	3, 2	14	14	11	12
48	2	33	3	9	1	4,5 0	5	2	3,5	4	2, 2	18	20	8	14
49	1	32	5	8	1	3,8 3	5	1,2 5	3,5	4, 2	3, 6	16	21	5	15
50	1	32	1	8	1	4,6 7	5	2,5	4,5	5	1, 8	23	25	13	23
51	1	31	3	7	1	3,3 3	4, 6	1,5	4,2 5	5	1	17	23	8	21
52	2	34	5	10	1	3,3 3	3, 8	1	3,5	4, 2	3, 8	14	16	4	15
53	2	32	1	8	1	3,5 0	3, 2	1,7 5	3,2 5	3, 4	2	12	11	6	11
54	1	48	3	24	2	3,6 7	4, 4	1,7 5	3,5	4, 6	2, 6	17	20	8	16
55	2	43	2	19	1	3,0 0	4, 4	2	3,2 5	4, 4	3	13	19	9	14
56	1	33	4	9	2	3,0 0	3	3	3	3	3	9	9	9	9
57	2	54	2	30	1	4,3 3	1, 6	2,2 5	4,2 5	4, 2	4	18	7	9	18

58	2	45	2	21	1	4,0	5	3,5	4,5	5	2,6	20	25	18	23	
59	2	53	1	29	1	4,1	4	4,2	3,7	4,4	4,2	18	18	19	17	
60	1	47	2	23	1	3,5	3,6	3	4	4	3	14	14	12	16	
61	1	36	4	12	2	3,3	5	2,2	4,2	3,2	1,2	11	16	7	14	
62	1	41	3	17	2	3,1	4,4	1,5	4,2	4,8	1,6	15	21	7	20	
63	1	40	1	16	1	3,6	4,2	1,7	3,7	4,4	2,6	16	18	8	17	
64	1	31	4	7	1	4,1	4,6	2	3	3,6	2,8	15	17	7	11	
65	1	38	4	14	3	2,6	3,6	1,2	2,7	4	2,8	11	14	5	11	
66	1	38	4	14	3	2,6	3,6	1,2	2,7	4	2,8	11	14	5	11	
67	2	26	3	2	3	3,6	3,8	1,7	3,7	5	3,8	18	19	9	19	
68	2	34	1	10	1	4,1	3	2,5	3,5	4,2	3,8	18	13	11	15	
69	2	39	3	15	1	2,8	2,4	2	2,5	3	1,8	9	7	6	8	
70	2	49	5	25	1	4,0	4,8	2,2	3,7	5	3,6	20	24	11	19	
71	1	35	5	11	3	3,3	3	4	2	3,5	3,4	11	14	7	12	
72	1	37	1	13	1	4,3	3	3	2	3,5	4	3	17	12	8	14

## HASIL OUTPUT STATISTIK

### Frequencies

#### Statistics

		JenisKelamin	Umur	Pendidikan	MasaKerja	Kabupaten
N	Valid	72	72	72	72	72
	Missing	0	0	0	0	0
Mean			38.79	1.47	14.79	2.89
Median			38.00	1.00	14.00	3.00
Std. Deviation			6.848	.769	6.848	1.359
Minimum			26	1	2	1
Maximum			54	3	30	5

### Frequency Table

#### JenisKelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	36	50.0	50.0	50.0
	Perempuan	36	50.0	50.0	100.0
Total		72	100.0	100.0	

#### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26	2	2.8	2.8	2.8
	30	3	4.2	4.2	6.9
	31	3	4.2	4.2	11.1
	32	7	9.7	9.7	20.8
	33	4	5.6	5.6	26.4
	34	6	8.3	8.3	34.7
	35	3	4.2	4.2	38.9
	36	3	4.2	4.2	43.1
	37	3	4.2	4.2	47.2
	38	6	8.3	8.3	55.6
	39	2	2.8	2.8	58.3
	40	3	4.2	4.2	62.5
	41	2	2.8	2.8	65.3
	42	3	4.2	4.2	69.4
	43	3	4.2	4.2	73.6
	44	3	4.2	4.2	77.8
	45	4	5.6	5.6	83.3
	46	1	1.4	1.4	84.7
	47	2	2.8	2.8	87.5
	48	2	2.8	2.8	90.3
	49	2	2.8	2.8	93.1
	51	1	1.4	1.4	94.4
	53	2	2.8	2.8	97.2
	54	2	2.8	2.8	100.0

Total	72	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

**Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	50	69.4	69.4	69.4
D3	10	13.9	13.9	83.3
S1	12	16.7	16.7	100.0
Total	72	100.0	100.0	

**MasaKerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.8	2.8	2.8
6	3	4.2	4.2	6.9
7	3	4.2	4.2	11.1
8	7	9.7	9.7	20.8
9	4	5.6	5.6	26.4
10	6	8.3	8.3	34.7
11	3	4.2	4.2	38.9
12	3	4.2	4.2	43.1
13	3	4.2	4.2	47.2
14	6	8.3	8.3	55.6
15	2	2.8	2.8	58.3
16	3	4.2	4.2	62.5
17	2	2.8	2.8	65.3
18	3	4.2	4.2	69.4
19	3	4.2	4.2	73.6
20	3	4.2	4.2	77.8
21	4	5.6	5.6	83.3
22	1	1.4	1.4	84.7
23	2	2.8	2.8	87.5
24	2	2.8	2.8	90.3
25	2	2.8	2.8	93.1
27	1	1.4	1.4	94.4
29	2	2.8	2.8	97.2
30	2	2.8	2.8	100.0
Total	72	100.0	100.0	

**Kabupaten**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kota Yogyakarta	16	22.2	22.2	22.2
Sleman	12	16.7	16.7	38.9
Bantul	18	25.0	25.0	63.9
Kulon Progo	16	22.2	22.2	86.1
Gunung Kidul	10	13.9	13.9	100.0
Total	72	100.0	100.0	

## Descriptives

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur	72	26	54	38.79	6.848
Pendidikan	72	1	3	1.47	.769
MasaKerja	72	2	30	14.79	6.848
Kabupaten	72	1	5	2.89	1.359
Tekanan	72	2.00	5.00	3.6250	.59191
SistemPengendalian	72	2.00	5.00	4.0139	.77810
Rasionalitas	72	1.00	4.00	2.2222	.79119
Kapabilitas	72	1.00	5.00	3.7083	.63772
Religiusitas	72	2.00	5.00	4.0417	.70085
KencdrKecurangan	72	1.00	4.00	2.8472	.91405
Valid N (listwise)	72				

## Reliability

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	72	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	72	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.540	.576	6

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Tekanan	3.6250	.59191	72
SistemPengendalian	4.0139	.77810	72
Rasionalitas	2.2222	.79119	72
Kapabilitas	3.7083	.63772	72
Religiusitas	4.0417	.70085	72
KencdrKecurangan	2.8472	.91405	72

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Religiusitas, Rasionalitas, SistemPengendalian, Tekanan, Kapabilitas <sup>b</sup>		. Enter

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.495 <sup>a</sup>	.245	.188	.82376	2.229

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Rasionalitas, SistemPengendalian, Tekanan, Kapabilitas

b. Dependent Variable: KencdrKecurangan

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.533	5	2.907	4.283	.002 <sup>b</sup>
	Residual	44.786	66	.679		
	Total	59.319	71			

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Rasionalitas, SistemPengendalian, Tekanan, Kapabilitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		StandardiCo efficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.330	.850		1.565	.122		
	Tekanan	.461	.181	.298	2.546	.013	.834	1.199
	Sistem Pengendalian	-.382	.135	-.325	-2.829	.006	.865	1.157
	Rasionalitas	.164	.137	.142	1.201	.234	.818	1.222
	Kapabilitas	-.097	.190	-.067	-.509	.612	.653	1.531
	Religiusitas	.340	.176	.261	1.932	.058	.627	1.594

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.7632	3.7110	2.8472	.45243	72
Residual	-1.94645	1.67811	.00000	.79422	72
Std. Predicted Value	-2.396	1.909	.000	1.000	72
Std. Residual	-2.363	2.037	.000	.964	72

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

**Regression**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
KencdrKecurangan	2.8472	.91405	72
X1X5	14.6250	3.49824	72
X2X5	16.2222	4.64280	72
X3X5	8.7083	3.52231	72
X4X5	14.6806	3.93549	72

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4X5, X3X5, X2X5, X1X5 <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

b. All requested variables entered.

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.339	4	3.585	5.340	.001 <sup>b</sup>
	Residual	44.980	67	.671		
	Total	59.319	71			

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan

b. Predictors: (Constant), X4X5, X3X5, X2X5, X1X5

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.946	.436		4.464	.000			
	X1X5	.121	.046	.462	2.614	.011	.278	.363	2.758
	X2X5	-.074	.031	-.378	-2.396	.019	-.255	.455	2.197
	X3X5	.057	.034	.221	1.712	.092	.182	.679	1.473
	X4X5	-.011	.047	-.046	-.229	.820	-.024	.280	3.566

a. Dependent Variable: KencdrKecurangan